

## **Danger Zone: The Coming Conflict with China**

Michael Christian Budianto dan Angle Caroline

**Penulis** : Hal Brands dan Michael Beckley

**Penerbit** : W.W. Norton & Company

**Tahun Terbit** : 2022

**Halaman** : 246 halaman

Kisah tentang “kebangkitan pengaruh Tiongkok” di kancah global merupakan salah satu yang paling sering dibaca di abad ke-21. Baik di Washington maupun di dunia, kebangkitan Beijing merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Semua negara sedang mempersiapkan dunia di mana Tiongkok akan menjadi nomor satu. Brand dan Beckley dalam *Danger Zone: The Coming Conflict with China* memberikan pandangan berlawanan mengenai Tiongkok dengan menjabarkan mengapa negara tersebut berada di dalam masalah yang lebih besar daripada yang para ahli pikirkan, mengapa tren tersebut membuat beberapa tahun ke depan semakin sulit, dan bagaimana Amerika Serikat menghadapi pengaruh Tiongkok yang semakin besar.

Brand dan Beckley berpendapat bahwa salah satu bencana geopolitik terbesar terjadi di persimpangan antara ambisi dan keputusasaan. Tiongkok di bawah kekuasaan Xi Jinping didorong oleh kedua hal tersebut. Ambisi Tiongkok adalah menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia, sedangkan keputusasaan yang dihadapi Tiongkok adalah perlambatan dan perasaan akan penurunan ekonomi. Di bawah kekuasaannya, Xi mengatakan bahwa Tiongkok sudah menjadi kuat, akan menjadi pemimpin dunia, menciptakan sosialisme yang superior daripada kapitalisme, dan memiliki posisi yang dominan. Dalam mencapai semua hal ini, penting untuk mengetahui strategi yang digunakan Tiongkok.

Menurut Brand dan Beckley, Partai Komunis Tiongkok (The Chinese Communist Party, CCP) memiliki empat tujuan utama sebagai bagian dari strategi Tiongkok yang lebih besar. Pertama, seperti rezim autokrasi pada umumnya, CCP ingin mempertahankan kekuasaan tangan besinya. Dalam hal ini, melanggengkan otoritas CCP adalah inti dari semua keputusan kunci. Tujuan utama Xi adalah memastikan agar CCP mendapat peran utama di setiap aspek kehidupan. Kedua, CCP ingin membuat Tiongkok menjadi utuh dengan cara mendapatkan kembali wilayah yang telah hilang karena peristiwa internal dan agresi asing. Saat ini, peta Tiongkok yang dibentuk Xi memasukkan Hong Kong dan Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok. Di samping itu, Tiongkok juga memiliki sengketa wilayah perairan yang luas karena klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Tiongkok terus meningkatkan kemampuan militernya. Pengeluaran Tiongkok di bidang militer naik 10 kali lipat antara tahun 1990 dan 2020. Dengan demikian, Tiongkok telah mempersiapkan diri untuk menginvasi Taiwan dan berperang dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat jika diperlukan. Tiongkok juga mendorong kekuatan geopolitiknya melalui *Belt and Road Initiative* dan jalan sutra digital yang mengarahkan orientasi negara-negara Eurasia kepada Tiongkok. Menurut Brand dan Beckley, Amerika Serikat merupakan ancaman terbesar terhadap perjalanan Tiongkok menjadi negara adidaya. Namun, Tiongkok tetap optimis seperti pernyataan Xi Jinping yang menegaskan bahwa era hegemoni Barat sudah berakhir dan saat ini adalah era dominasi Timur (Tiongkok).

Meskipun demikian, Tiongkok juga memiliki kelemahan yang harus diwaspadai. Tiongkok telah mengalami dan menyembunyikan perlambatan ekonomi yang tajam. Selain itu, terdapat problem politik, penurunan sumber daya yang semakin parah, dan permasalahan demografis. Terlebih lagi, Tiongkok telah kehilangan akses terhadap

keterbukaan dunia yang pada tahun 1970an telah membawa banyak keuntungan. Saat ini, Beijing semakin menjadi kekuatan revisionis yang buruk. Menurut Brand dan Beckley, kebangkitan Tiongkok dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, situasi geopolitik yang terbuka, yakni adanya hubungan yang baik dengan Amerika Serikat. Kedua, kepemimpinan yang berkomitmen pada reformasi ekonomi dan perubahan institusional, di mana terjadi pemangkasan birokrasi sehingga sistem institusional menjadi semakin profesional. Ketiga, adanya perubahan institusional dan pemberdayaan birokrasi yang profesional. Keempat, dividen demografis yang terbesar dalam sejarah, dan kelima sumber daya alam yang melimpah.

Namun, ketiga situasi tersebut tidak berlangsung selamanya. Saat ini, kondisi-kondisi yang memungkinkan kebangkitan Tiongkok telah menurun. Banyak aset yang dulu menguntungkan justru sekarang menjadi beban. Pertama, permasalahan demografis. Tiongkok dihadapkan pada kekurangan sumber daya manusia yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, penurunan sumber daya alam. Meskipun di masa lampau Tiongkok memiliki performa ekonomi yang baik, sering kali pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan keberlanjutan. Alhasil, terjadi kerusakan lingkungan yang parah dan Tiongkok harus membayar harga yang mahal untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih dan ketahanan pangan.

Di samping itu, perubahan institusional yang dahulu dipertahankan semakin sulit. Situasi ini diperparah dengan sentralisasi yang dilakukan Xi Jinping. Pemerintahan Xi Jinping justru menambah regulasi yang restriktif terhadap dunia usaha dan menghilangkan aspek kesepakatan kolektif dalam berbagai kesempatan. Hal ini mendorong stagnasi perekonomian di Tiongkok. Ketiga, lingkungan geopolitik yang lebih agresif. Saat ini, dunia di luar Tiongkok menjadi tidak kondusif untuk tumbuh karena terdapat berbagai permasalahan seperti krisis ekonomi global dan halangan

ekonomi yang ditetapkan oleh negara-negara terhadap produk Tiongkok, khususnya yang berkaitan dengan teknologi.

Terhadap tujuan ketiga, menurut Brand dan Beckley, Tiongkok juga menghadapi ancaman geopolitik yang besar di saat memiliki ambisi untuk menjadi hegemoni regional. Berbeda dengan kondisi geopolitik yang dahulu menjadi fokus nomor dua setelah pengembangan domestik secara ekonomi, Tiongkok sekarang telah membuat banyak gesekan di kawasan. Pertama, klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan berdampak pada posisi Tiongkok di bidang militer. Tiongkok harus berhadapan dengan negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Filipina, Indonesia, dan Jepang yang semakin dekat dengan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut terus meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi konfrontasi Tiongkok. Kedua, klaim Tiongkok atas Taiwan yang semakin lemah. Berdasarkan survei domestik yang dilakukan, 55 persen masyarakat Taiwan tidak mengidentifikasi diri sebagai warga negara Tiongkok. Hal ini menunjukkan integrasi Taiwan dan Tiongkok akan semakin sulit. Kondisi diperparah dengan peningkatan pengeluaran militer Taiwan dan posisi Amerika Serikat yang akan membantu jika ada invasi. Terakhir, konflik Tiongkok dan Jepang atas kepulauan Senkaku juga mengakibatkan persaingan di bidang ekonomi dan militer kedua negara.

Jika melihat sejarah, kondisi Jerman dan Jepang sebelum Perang Dunia I dapat dibandingkan dengan kondisi Tiongkok saat ini. Kedua negara tersebut merupakan kekuatan revisionis dan otoriter yang mampu menantang *status quo* dunia. Namun, kedua negara tersebut juga menghadapi stagnasi dan pengasingan dunia. Seperti Jepang, Tiongkok juga mengalami perlambatan ekonomi yang panjang dan sulit dihindari. Tiongkok menghadapi kelompok 'rival' yang bekerja untuk memperlambat pertumbuhan negaranya. Selain itu, Tiongkok memiliki sistem otoriter dan model ekonomi yang membuat ekspansi merkantilisme lebih menarik. Ekspektasi perdagangan Tiongkok berubah menjadi negatif. Menurut

Brand dan Beckley, negara revisionis, seperti Tiongkok yang khawatir akan masa depan, sangat mungkin bertindak dengan impulsif. Hal ini harus diwaspadai karena merupakan negara adidaya yang bangkit, namun tidak mau menerima konsekuensi dari penurunannya.

Pada September 2020, Tiongkok memperlihatkan perubahan strategi militernya dengan peluncuran sebuah video peledakan alat tempur di pusat kekuatan udara Amerika Serikat oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army Air Force, PLAAF) untuk menunjukkan perkembangan keterampilan dan kemampuan militernya. Hal ini sejalan dengan keamanan nasional yang diumumkan oleh Xi Jinping pada tahun 2012, yaitu Tiongkok menghadapi ancaman yang kian buruk dan CCP harus melawan ancaman tersebut lebih dulu. Ancaman utama bagi Tiongkok sendiri adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan permusuhan dengan negara asing. Strategi keamanan nasional formal dan Komite Keamanan Nasional Tiongkok pun terbentuk pada tahun 2014 untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Strategi keamanan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama, mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap domain dan proses pembangunan nasional. Kedua, melakukan tindakan pencegahan dan pengendalian ancaman sebelum meluas.

Lebih lanjut, tantangan utama Tiongkok sejak 2008 adalah imperialisme. Tiongkok terperangkap dalam situasi di mana imperialisme ekonomi tidak bisa ditinggalkan. Tiongkok sulit untuk mereformasi ekonominya dengan benar tanpa memunculkan bahaya kapitalisme kroni yang menopang sistem politiknya. Kenyataan yang timbul dari imperialisme Tiongkok dilambangkan melalui kebijakan *dual circulation* yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Tiongkok, serta mendominasi produksi teknologi dan sumber daya utama. Namun, dengan meningkatnya permusuhan tingkat global, pilihan yang dapat diambil Tiongkok adalah mengurangi ketergantungan dan membuat pihak lain

bergantung padanya. Langkah pertama untuk merealisasikannya adalah melalui dominasi produksi teknologi dan mengisi kekosongan yang mungkin menyebabkan putusnya rantai pasokan Tiongkok. Langkah kedua adalah menghubungkan dunia dengan memasang jaringan 5G dan sistem satelit.

Keempat, Tiongkok juga berambisi untuk menjadikan model otoriternya sebagai sistem pemerintahan yang superior dibanding sistem demokrasi elektoral negara Barat. Tiongkok turut memiliki kepentingan dalam mencegah penyebaran demokrasi karena melihat tatanan dunia liberal telah dicurangi oleh Amerika Serikat, terutama dalam lembaga-lembaga internasional, sehingga perlu diubah. Autokrasi Tiongkok yang dahulu mudah untuk diperkenalkan kini semakin sulit dengan adanya permusuhan global dan tindakan revolusioner di beberapa negara. Serangan ideologis Tiongkok terhadap demokrasi secara mendalam didasari oleh tiga alasan. Pertama, tren penyebaran sistem otoriter dan penurunan demokrasi sejak tahun 2006. Kedua, meluasnya jangkauan global Tiongkok dari sebelum-sebelumnya. Ketiga, revolusi digital yang sedang berlangsung.

Kemunculan invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi momentum bagi para pemerintah bahwa persaingan geopolitik dapat berubah menjadi konflik militer. Naiknya Rusia sebagai negara revisionis juga menjadi dorongan bagi Tiongkok untuk mencapai tujuan geopolitiknya. Pendekatan Tiongkok untuk mencapai tujuan tersebut berubah dari yang semula nonkonfrontatif menjadi represif. Kemungkinan terbesar dari tindakan penyerangan Tiongkok ditujukan pada penaklukan Taiwan yang telah menjadi tujuan utama kebijakan luar negerinya. Tiongkok dapat menggunakan Taiwan untuk memproyeksikan kekuatan di Pasifik dan memutus aliansi Amerika Serikat di Asia Timur. Alasan lain Taiwan menjadi target Tiongkok adalah faktor geografis dan peluang militer yang menguntungkan walaupun terbatas. Dengan tren yang

demikian, Amerika Serikat memerlukan strategi jangka pendek maupun panjang.

Dari situasi tersebut, peninjauan ulang terhadap peristiwa Perang Dingin merupakan hal penting bagi Amerika Serikat untuk menyusun strategi dalam menghadapi *danger-zone*. Dalam hal ini, terdapat empat wawasan strategis bagi Amerika Serikat untuk menghadapinya. Pertama, menyusun prioritas mulai dari hal terpenting dan mencegah aksi jangka pendek yang dapat mengubah keseimbangan jangka panjang. Kedua, menggabungkan tujuan strategis dan taktis. Ketiga, melakukan sedikit pelanggaran sebagai bentuk pertahanan terbaik. Keempat, memastikan tercapainya rencana jangka panjang demi memenangkan *danger-zone*.

Sejak tahun 2017, dua pemerintahan Amerika Serikat telah melihat Tiongkok sebagai ancaman yang dapat menentukan kondisi di abad ke-21. Oleh karena itu, para pejabat Amerika Serikat telah menyusun strategi dalam menjaga dominasi Amerika Serikat secara ekonomi, militer, dan diplomatik. Dalam menghadapi skenario *danger-zone* tersebut, Amerika Serikat bersandar pada prinsip yang membantunya di awal Perang Dingin. Pertama, menggagalkan keberhasilan aksi jangka pendek yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di jangka panjang, namun tidak mengabaikan aspek persaingan kecil jangka pendek dengan Tiongkok. Kedua, mengadaptasi kemampuan di masa lalu untuk tujuan baru dan membentuk koalisi dengan cepat. Ketiga, mengambil risiko sambil memperhitungkan biayanya dengan memancing Tiongkok untuk terperangkap dalam kesalahan strategis. Keempat, Amerika Serikat harus memastikan kemenangan jangka panjang dengan melangkah jauh, membangun keunggulan, dan membentuk koalisi yang memperbesar kemungkinan kemenangannya.

Berbicara mengenai strategi menghadapi *danger-zone*, terdapat salah satu bahaya yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, yaitu

perkembangan teknologi tinggi Tiongkok. Dalam meresponsnya, Amerika Serikat harus mencegah Tiongkok memonopoli teknologi kritis dengan potensi keuntungan ekonomi dan militer yang besar. Hal ini berkesinambungan dengan peralihan fokus Amerika Serikat yang awalnya ingin memaksa Tiongkok mengikuti tatanan ekonomi yang adil dan terbuka menjadi melemahkan kemampuan teknologi Tiongkok. Metode terbaik saat ini yang mungkin dilakukan adalah membentuk aliansi ekonomi informal yang mengecualikan dan mengalahkan Tiongkok. Metode tersebut berkaca dari bagaimana Amerika Serikat mengumpulkan negara-negara demokrasi selama Perang Dingin untuk berbagi teknologi, mengumpulkan dana riset dan pembangunan, serta mengintegrasikan rantai pasok.

Metode lain untuk menghadapi *danger-zone* adalah dengan melindungi keberlangsungan demokrasi di masa depan. Tugas yang perlu dilakukan Amerika Serikat sekarang adalah memobilisasi negara yang siap untuk menyerang sistem otoriter digital Tiongkok, alih-alih membangun organisasi yang luas. Dalam hal ini, pendekatan ofensif Amerika Serikat mengakomodasi berbagai kemampuan dan kepentingan negara-negara demokratis dalam beberapa cara. Pertama, Amerika Serikat dan sekutu secara agresif meretas sistem otoriter digital untuk merusak efektivitasnya. Kedua, memperlambat penyebaran teknologi yang relevan dengan represi. Ketiga, mendorong kerja sama ekonomi di antara negara-negara demokrasi. Keempat, Amerika Serikat dan sekutu membuka blok digital di mana data dan produk dapat diakses secara bebas, sementara Tiongkok dan koalisinya dikecualikan. Kelima, melibatkan kemitraan dengan negara-negara berkembang. Keenam, Amerika Serikat harus mempertahankan demokrasi dalam konfliknya dengan Tiongkok.

Amerika Serikat dapat turut mencegah upaya pembangkangan Tiongkok dengan terjun dalam masalah Taiwan. Beberapa analis percaya bahwa Amerika Serikat harus mengikat Taiwan dalam perjanjian sebagai jaminan

keamanannya. Namun, Amerika Serikat dan Taiwan dinilai belum siap menghadapi kemungkinan penyerangan Tiongkok dalam waktu dekat sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengubah jalur perairan internasional Selat Taiwan menjadi perangkap bagi Tiongkok dengan menempatkan peluncur rudal dan berbagai alat tempur lainnya. Kedua, Amerika Serikat harus menyebarkan pasukannya ke sejumlah lokasi operasi kecil di Asia Timur. Ketiga, Amerika Serikat perlu membantu Taiwan untuk menyiapkan diri dengan menyumbang amunisi dan dana. Keempat, meningkatkan kehadiran militer Amerika Serikat di dekat Tiongkok dan bahkan di Taiwan. Kelima, Amerika Serikat harus mengembangkan kemampuannya untuk mengganggu sistem komunikasi militer Tiongkok. Keenam, Amerika Serikat perlu membuat Tiongkok menyadari dan menimbang waktu dan biaya yang mungkin dikeluarkan dari berperang dengan Taiwan. Namun, apabila metode pencegahan tersebut gagal, maka konflik secara material dan psikologis dengan Tiongkok tak terhindarkan.

Berbagai kompleksitas dan kemungkinan dari *danger-zone* pada akhirnya membawa pada fakta bahwa Amerika Serikat menghadapi tantangan yang vital dan perlu mempersiapkan diri. Perubahan seperti ini sesungguhnya sudah dapat diprediksi. Pada dasarnya perang dingin baru mungkin muncul dengan pemisahan dua blok yang kian cepat, pecahnya dunia teknologi, militerisasi kawasan Asia Timur, dan persaingan ideologi yang memanas.

Pertanyaan yang mungkin muncul terkait perang dingin baru adalah apa yang akan terjadi dengan Tiongkok ketika perang tersebut berlangsung. Secara kolektif, Tiongkok diprediksi akan mengalami kelesuan ekonomi, dikucilkan secara internasional, dan tidak stabil secara politik. Di sisi lain, Amerika Serikat mungkin perlu mengubah pendekatan yang berfokus pada *danger-zone* menjadi pendekatan yang dapat bertahan selama perang dingin baru berlangsung. Dalam melakukan transisi tersebut, terdapat sepuluh prinsip yang dapat digunakan Amerika Serikat. Pertama,

menentukan kemenangan seperti apa yang diinginkannya. Kedua, belajar mengatur kecepatan alih-alih daya tahan dalam bertindak. Ketiga, membentuk rivalitas melalui pembentukan sistem yang didasari komunitas demokratis. Keempat, Amerika Serikat harus berjuang secara asimetris dan mengelola biaya dalam mempertahankan kepentingannya. Kelima, Amerika Serikat harus terus berinvestasi dalam sumber kekuatan utama dunia. Keenam, menggunakan ketegangan global sebagai motivasi mulainya era baru bagi reformasi Amerika Serikat. Ketujuh, menggunakan negosiasi untuk mempertahankan keunggulan Amerika Serikat. Kedelapan, menerapkan pendekatan yang berlawanan dengan institusi Tiongkok dan Rusia. Kesembilan, menggabungkan pendekatan yang tegas dan lembut. Terakhir, Amerika Serikat harus bersabar dan tidak gegabah dalam segala proses.